

IMPLEMENTASI ETIKA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PUBLIK: TANTANGAN DAN LANGKAH UTAMA DALAM MENCIPTAKAN GOOD GOVERNANCE

Dita Salsabila¹, Zalfa Zahira Fitriani², Hayat³

Universitas Islam Malang

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember 2024

Revised Desember 2024

Accepted Desember 2024

Available online Desember 2024

122301091021@unisma.ac.id

^d¹,

222301091037@unisma.ac.id

^d²



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Abstract. Ethics in public decision making plays an important role in creating good governance. The application of ethical principles strengthens transparency, accountability and justice in public policy, and increases public trust in the government. However, the implementation of ethics faces various challenges, such as conflicts of interest, political pressure, and low ethical literacy. Public officials are often caught in situations where personal or group interests trump public interests, potentially reducing policy effectiveness and legitimacy. Various strategic steps are needed to overcome these obstacles. Strengthening regulations and ethics education are key in increasing the understanding and capacity of public officials. Community participation in decision-making processes also needs to be strengthened to ensure policies are more inclusive and representative. In addition, transparency and open access to information are very important to create accountability and avoid abuse of authority.

Consistent implementation of ethics will mitigate the risk of corruption and improve the quality of public services, thereby creating a more effective government with integrity. Overall, ethics is not just an additional norm, but the foundation for creating sustainable and stable governance. Synergy between government, institutions and society is very necessary so that ethical principles can be internalized in every aspect of public policy. Thus, the application of ethics will strengthen government legitimacy, increase public trust, and create a government that is transparent, just, and responsive.

Keywords: Ethics, Public Decision Making, Good Governance, Transparency, Accountability, Community Participation, Corruption

Abstrak. Etika dalam pengambilan keputusan publik berperan penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penerapan prinsip etis memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam kebijakan publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, implementasi etika menghadapi berbagai tantangan, seperti konflik kepentingan, tekanan politik, dan rendahnya literasi etika. Pejabat publik sering terjebak dalam situasi di mana kepentingan pribadi atau kelompok mengalahkan kepentingan umum, yang berpotensi mengurangi efektivitas dan legitimasi kebijakan. Berbagai langkah strategis diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penguatan regulasi dan pendidikan etika menjadi kunci dalam meningkatkan pemahaman dan kapasitas pejabat publik. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga perlu diperkuat untuk memastikan kebijakan lebih inklusif dan representatif. Selain itu, transparansi dan keterbukaan akses informasi sangat penting untuk menciptakan akuntabilitas dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Implementasi etika yang konsisten akan memitigasi risiko korupsi dan memperbaiki kualitas pelayanan publik, sehingga mewujudkan pemerintahan

yang lebih efektif dan berintegritas. Secara keseluruhan, etika bukan sekadar norma tambahan, tetapi fondasi bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan dan stabil. Sinergi antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat sangat diperlukan agar prinsip-prinsip etika dapat diinternalisasi dalam setiap aspek kebijakan publik. Dengan demikian, penerapan etika akan memperkuat legitimasi pemerintah, meningkatkan kepercayaan publik, dan mewujudkan pemerintahan yang transparan, berkeadilan, dan responsif.

Kata Kunci: Etika, Pengambilan Keputusan Publik, *Good Governance*, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Korupsi

PENDAHULUAN

Pengambilan keputusan publik memegang peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Etika dalam proses pengambilan keputusan bukan hanya sekadar aspek normatif, tetapi juga menjadi landasan dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Di era modern, kompleksitas kebijakan dan tekanan dari berbagai pemangku kepentingan menuntut setiap keputusan publik untuk mempertimbangkan aspek moral dan etis. Ketika keputusan yang diambil tidak didasarkan pada prinsip etika yang kuat, akan muncul berbagai persoalan seperti korupsi, ketidakpercayaan publik, dan rendahnya legitimasi kebijakan yang diterapkan. Oleh karena itu, implementasi etika dalam proses pengambilan keputusan publik bukan sekadar idealisme, tetapi kebutuhan mendasar bagi terciptanya pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

Tantangan dalam penerapan etika di sektor publik cukup signifikan. Pertama, adanya konflik kepentingan sering kali menjadi penghambat dalam pengambilan keputusan yang obyektif. Para pemangku kebijakan sering dihadapkan pada situasi di mana kepentingan pribadi atau kelompok tertentu berbenturan dengan kepentingan publik. Kedua, tekanan politik dan ekonomi juga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan, membuat keputusan yang diambil tidak selalu selaras dengan prinsip etis. Selain itu, masih banyak pejabat publik yang kurang memahami pentingnya etika sebagai pijakan dalam membuat kebijakan, sehingga aspek ini sering terabaikan. Rendahnya literasi dan kesadaran etis menambah kompleksitas persoalan ini, terutama di negara berkembang yang masih bergelut dengan masalah birokrasi dan korupsi.

Di sisi lain, implementasi etika dalam pengambilan keputusan publik memiliki peran strategis dalam mendorong tata kelola yang baik. Penerapan etika dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan aspek legal tetapi juga kepentingan moral. *Good governance* sendiri mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan, yang semuanya membutuhkan landasan etis yang kuat. Dengan demikian, etika bukan hanya elemen tambahan, tetapi inti dari setiap upaya reformasi tata kelola pemerintahan. Ketika pejabat publik mampu bertindak berdasarkan etika, mereka dapat memitigasi risiko korupsi dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi layanan publik.

Penelitian tentang implementasi etika dalam pengambilan keputusan publik juga penting untuk memahami berbagai pendekatan dan langkah strategis yang dapat diterapkan. Langkah-langkah ini mencakup penguatan regulasi etika, peningkatan kapasitas pejabat publik

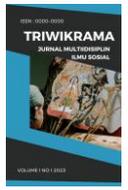
melalui pendidikan dan pelatihan, serta penciptaan sistem pemantauan yang efektif. Dalam konteks ini, diperlukan kerangka kebijakan yang jelas untuk memastikan setiap keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan juga perlu diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi publik dan menciptakan rasa keadilan.

Adapun tujuan dari kajian mengenai implementasi etika dalam pengambilan keputusan publik adalah untuk menggali lebih dalam berbagai tantangan dan peluang yang ada dalam menciptakan good governance. Dengan memahami tantangan yang dihadapi, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan oleh para pembuat kebijakan. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan baru tentang pentingnya integritas dan tanggung jawab moral dalam setiap proses pengambilan keputusan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Implementasi etika yang tepat dapat menjadi katalis bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Rumusan masalah yang diangkat dalam pembahasan ini meliputi: bagaimana etika dapat diterapkan secara efektif dalam pengambilan keputusan publik? Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi etika di sektor publik? Langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mendorong penerapan etika dalam rangka menciptakan good governance? Bagaimana keterlibatan masyarakat dapat memperkuat proses pengambilan keputusan yang etis? Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab agar pemahaman mengenai keterkaitan antara etika dan good governance dapat semakin jelas dan aplikatif dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

Manfaat dari implementasi etika dalam pengambilan keputusan publik sangat luas dan mendalam. Dari sudut pandang pemerintahan, penerapan etika dapat meningkatkan kualitas kebijakan dan memastikan keputusan yang diambil bersifat inklusif dan adil. Dari sisi masyarakat, penerapan etika akan memperkuat rasa kepercayaan terhadap pemerintah dan mendorong partisipasi aktif dalam proses politik. Selain itu, implementasi etika juga dapat meminimalisasi risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, sehingga menciptakan iklim pemerintahan yang lebih sehat. Dalam jangka panjang, etika dalam pengambilan keputusan publik akan menjadi fondasi bagi pembangunan berkelanjutan dan stabilitas sosial.

Implementasi etika dalam pengambilan keputusan publik menegaskan bahwa good governance tidak dapat dicapai hanya dengan regulasi dan kebijakan formal, tetapi juga membutuhkan komitmen moral dan integritas dari setiap aktor yang terlibat. Meskipun tantangan dalam penerapannya tidak dapat diabaikan, langkah-langkah strategis seperti penguatan regulasi, pendidikan etika, dan partisipasi publik akan sangat membantu dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan demikian, implementasi etika bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga instrumen penting untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berkeadilan.



KAJIAN PUSTAKA

Implementasi etika dalam pengambilan keputusan publik merupakan topik yang menarik perhatian banyak peneliti dan praktisi, mengingat peran penting etika dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Kajian pustaka ini akan membahas tiga aspek utama yang berkaitan dengan tema tersebut: teori etika dalam pengambilan keputusan publik, tantangan dalam penerapan etika, serta langkah-langkah strategis untuk meningkatkan etika dalam pengambilan keputusan publik.

Teori etika menjadi landasan bagi pemahaman tentang bagaimana keputusan publik seharusnya diambil. Menurut Gusrita & Martha (2023) etika dalam kepemimpinan mencakup prinsip-prinsip yang memandu perilaku dan keputusan seorang pemimpin. Dalam konteks pengambilan keputusan publik, etika berfungsi sebagai kerangka untuk menilai tindakan dan keputusan yang diambil oleh pejabat publik. Beberapa pendekatan etika, seperti utilitarianisme, deontologi, dan etika kebajikan, menawarkan perspektif berbeda dalam menilai keputusan. Utilitarianisme menekankan pada hasil terbaik bagi jumlah terbesar orang, sedangkan deontologi menekankan pada kewajiban dan hak individu. Di sisi lain, etika kebajikan menekankan pada karakter dan niat baik dari pengambil keputusan. Pemahaman yang mendalam tentang berbagai teori etika ini sangat penting untuk membangun kultur etika di kalangan pejabat publik, yang pada gilirannya dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih transparan dan akuntabel.

Namun, penerapan etika dalam pengambilan keputusan publik tidak lepas dari berbagai tantangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Usman (2022), terdapat beberapa faktor yang menghambat implementasi etika di sektor publik, di antaranya adalah tekanan politik, konflik kepentingan, dan rendahnya kesadaran etika di kalangan pejabat publik. Tekanan dari pihak-pihak tertentu, baik itu partai politik maupun kelompok kepentingan, sering kali mempengaruhi proses pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil tidak selalu mencerminkan nilai-nilai etis yang seharusnya. Konflik kepentingan, baik secara pribadi maupun profesional, juga dapat memengaruhi obyektivitas dan integritas pengambil keputusan. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pendidikan etika bagi pejabat publik menambah kompleksitas masalah ini, karena banyak di antara mereka yang tidak memahami sepenuhnya pentingnya menerapkan etika dalam keputusan yang mereka ambil. Oleh karena itu, tantangan ini perlu diidentifikasi dan diatasi untuk mewujudkan good governance yang berkelanjutan.

Langkah-langkah strategis perlu diambil untuk meningkatkan implementasi etika dalam pengambilan keputusan publik. Menurut kajian yang dilakukan oleh Setiawan & Fauzi, (2019) beberapa langkah utama yang dapat diambil meliputi penguatan regulasi etika, peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, serta penerapan sistem pemantauan yang efektif. Penguatan regulasi etika dapat dilakukan melalui penyusunan kode etik yang jelas dan komprehensif, yang menjadi pedoman bagi pejabat publik dalam mengambil keputusan. Pendidikan dan pelatihan etika juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pejabat publik tentang nilai-nilai etika yang harus diterapkan dalam kebijakan dan tindakan mereka. Selain itu, penerapan sistem pemantauan yang transparan dan akuntabel dapat membantu memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat



dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengambilan keputusan publik dapat berjalan lebih baik, menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan mewujudkan good governance yang diharapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan mengenai implementasi etika dalam pengambilan keputusan publik menunjukkan bahwa etika memegang peranan krusial dalam mewujudkan good governance. Pertama, etika sebagai landasan dalam pengambilan keputusan publik menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Pengambilan keputusan yang berbasis pada prinsip-prinsip etis dapat menghindarkan pemerintah dari berbagai masalah, seperti korupsi dan ketidakpercayaan publik. Etika bukan hanya sekadar norma, tetapi juga menjadi kerangka kerja yang dapat membimbing para pengambil keputusan untuk bertindak dengan integritas. Keberhasilan dalam menerapkan etika di sektor publik akan berkontribusi pada legitimasi kebijakan yang diambil dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kedua, tantangan dalam implementasi etika di sektor publik, seperti konflik kepentingan dan tekanan politik, menjadi penghambat yang signifikan. Banyak pejabat publik yang terjebak dalam situasi di mana kepentingan pribadi atau kelompok mengalahkan kepentingan umum, sehingga keputusan yang diambil tidak mencerminkan etika yang diharapkan. Selain itu, rendahnya kesadaran dan literasi etika di kalangan pengambil keputusan menjadi masalah yang perlu diatasi. Dengan demikian, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman etika di kalangan pejabat publik agar mereka dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.

Ketiga, langkah-langkah strategis diperlukan untuk memperkuat implementasi etika dalam pengambilan keputusan publik. Peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan etika menjadi salah satu langkah utama yang harus diambil. Dengan memberikan pelatihan yang memadai, pejabat publik dapat lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam kebijakan yang dihasilkan. Selain itu, penguatan regulasi etika dan penciptaan sistem pemantauan yang efektif juga sangat penting. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan.

Keempat, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik harus diperkuat. Partisipasi masyarakat dapat memberikan masukan yang berharga dan meningkatkan legitimasi kebijakan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah dapat menciptakan keputusan yang lebih inklusif dan representatif. Ini juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong partisipasi aktif dalam proses politik.

Terakhir, manfaat dari implementasi etika dalam pengambilan keputusan publik sangat signifikan. Kualitas kebijakan yang dihasilkan akan meningkat, dan keputusan yang diambil akan lebih inklusif dan adil. Dari sudut pandang masyarakat, penerapan etika akan memperkuat rasa percaya terhadap pemerintah, menciptakan iklim pemerintahan yang sehat, dan mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan. Dalam jangka panjang, penerapan etika dalam

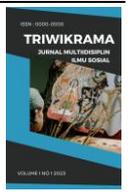
pengambilan keputusan publik akan menjadi fondasi bagi pembangunan berkelanjutan dan stabilitas sosial.

Pembahasan ini menegaskan bahwa implementasi etika dalam pengambilan keputusan publik bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga merupakan kebutuhan mendasar bagi terciptanya good governance. Meskipun ada berbagai tantangan yang dihadapi, langkah-langkah strategis seperti penguatan regulasi, pendidikan etika, dan partisipasi publik dapat menjadi solusi yang efektif. Dengan komitmen moral dan integritas dari setiap aktor yang terlibat, diharapkan pengambilan keputusan publik dapat berjalan dengan lebih baik, menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berkeadilan.

Selain itu, penting untuk memahami bahwa implementasi etika dalam pengambilan keputusan publik bukanlah suatu proses yang instan, tetapi memerlukan komitmen dan upaya berkelanjutan dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga, dan masyarakat. Keberhasilan dalam menciptakan budaya etika di sektor publik memerlukan integrasi prinsip-prinsip etis dalam setiap aspek kebijakan dan praktik pemerintahan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah membangun jaringan kerja yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi non-pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil. Jaringan ini dapat berfungsi sebagai platform untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta untuk mengadvokasi pentingnya etika dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta juga dapat memperkuat implementasi etika, dengan mendorong standar etika yang tinggi dalam bisnis dan interaksi dengan pihak pemerintah.

Pentingnya pelaporan dan transparansi dalam pengambilan keputusan publik juga tidak bisa diabaikan. Masyarakat perlu diberikan akses informasi yang memadai mengenai proses pengambilan keputusan dan dasar-dasar kebijakan yang diterapkan. Dengan adanya transparansi, masyarakat akan lebih mudah untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang diambil, sehingga menciptakan akuntabilitas yang lebih tinggi. Di samping itu, pendekatan pendidikan yang berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari implementasi etika. Pendidikan etika tidak hanya harus ditujukan kepada pejabat publik, tetapi juga kepada masyarakat luas. Program-program pendidikan yang memfokuskan pada kesadaran etis dan pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih peka terhadap isu-isu etika dan tata kelola. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang etika dan tanggung jawab mereka, mereka akan lebih proaktif dalam menuntut akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah.

Implementasi etika dalam pengambilan keputusan publik menunjukkan bahwa meskipun tantangan yang ada cukup besar, peluang untuk menciptakan good governance melalui etika sangatlah signifikan. Keberhasilan dalam menerapkan etika dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong terciptanya kebijakan yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan mengurangi praktik korupsi. Langkah-langkah strategis yang mencakup pendidikan, regulasi yang ketat, dan keterlibatan masyarakat perlu diimplementasikan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya legal, tetapi juga etis.



Semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, lembaga, maupun masyarakat, harus bersinergi dalam menciptakan budaya etika yang kuat di sektor publik. Hanya dengan komitmen bersama untuk menegakkan prinsip-prinsip etika dalam pengambilan keputusan publik, kita dapat berharap untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, implementasi etika tidak hanya akan menjadi fondasi bagi pengambilan keputusan yang lebih baik, tetapi juga akan menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan dan legitimasi pemerintahan di mata publik.

Selain itu, penting untuk memahami bahwa implementasi etika dalam pengambilan keputusan publik bukanlah suatu proses yang instan, tetapi memerlukan komitmen dan upaya berkelanjutan dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga, dan masyarakat. Keberhasilan dalam menciptakan budaya etika di sektor publik memerlukan integrasi prinsip-prinsip etis dalam setiap aspek kebijakan dan praktik pemerintahan.

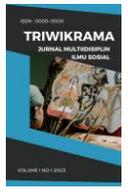
Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah membangun jaringan kerja yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi non-pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil. Jaringan ini dapat berfungsi sebagai platform untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta untuk mengadvokasi pentingnya etika dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta juga dapat memperkuat implementasi etika, dengan mendorong standar etika yang tinggi dalam bisnis dan interaksi dengan pihak pemerintah.

Pentingnya pelaporan dan transparansi dalam pengambilan keputusan publik juga tidak bisa diabaikan. Masyarakat perlu diberikan akses informasi yang memadai mengenai proses pengambilan keputusan dan dasar-dasar kebijakan yang diterapkan. Dengan adanya transparansi, masyarakat akan lebih mudah untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang diambil, sehingga menciptakan akuntabilitas yang lebih tinggi.

Di samping itu, pendekatan pendidikan yang berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari implementasi etika. Pendidikan etika tidak hanya harus ditujukan kepada pejabat publik, tetapi juga kepada masyarakat luas. Program-program pendidikan yang memfokuskan pada kesadaran etis dan pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih peka terhadap isu-isu etika dan tata kelola. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang etika dan tanggung jawab mereka, mereka akan lebih proaktif dalam menuntut akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah.

KESIMPULAN

Implementasi etika dalam pengambilan keputusan publik merupakan aspek fundamental dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Etika tidak hanya berperan sebagai norma abstrak, tetapi menjadi pedoman konkret bagi para pemangku kebijakan untuk bertindak secara transparan, akuntabel, dan adil. Penerapan etika yang konsisten dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan legitimasi kebijakan yang diambil. Ketika pejabat publik mengedepankan etika dalam setiap keputusan, mereka dapat menghindari berbagai persoalan seperti korupsi, konflik kepentingan, dan rendahnya partisipasi publik.



Tantangan yang dihadapi dalam implementasi etika di sektor publik tidak dapat diabaikan. Konflik kepentingan, tekanan politik, dan rendahnya kesadaran akan pentingnya prinsip etis sering kali menjadi hambatan utama dalam pengambilan keputusan. Pejabat publik terkadang berada di bawah tekanan untuk memenuhi kepentingan pribadi, kelompok, atau partai politik, sehingga keputusan yang diambil tidak selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Di samping itu, literasi etika yang masih rendah menambah kompleksitas masalah ini, terutama di negara-negara dengan birokrasi yang belum efektif dan tingkat korupsi yang tinggi. Namun, berbagai solusi strategis telah diidentifikasi untuk meningkatkan implementasi etika dalam pengambilan keputusan publik.

Penguatan regulasi dan kebijakan terkait kode etik menjadi langkah penting untuk memberikan pedoman yang jelas bagi pejabat publik. Selain itu, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan tentang etika dan tata kelola diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman para pengambil kebijakan. Partisipasi aktif masyarakat juga perlu diperkuat agar mereka dapat berperan sebagai pengawas dan mitra pemerintah dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi dalam kebijakan dan keterbukaan akses informasi akan memudahkan publik untuk terlibat dan memberikan masukan yang konstruktif.

Implementasi etika juga dapat berperan sebagai katalis bagi reformasi birokrasi dan perbaikan kualitas layanan publik. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip etika, pemerintah akan lebih efisien dan responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, penerapan etika secara konsisten dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan integritas aparatur negara. Pada akhirnya, penerapan etika tidak hanya akan memperbaiki citra pemerintahan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan stabilitas sosial.

Secara keseluruhan, etika dalam pengambilan keputusan publik bukanlah pilihan tambahan, tetapi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan good governance. Komitmen dan kerja sama antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat sangat diperlukan agar prinsip-prinsip etika dapat diinternalisasi dalam setiap aspek pengambilan keputusan. Meskipun tantangan yang dihadapi cukup kompleks, langkah-langkah strategis yang tepat dapat mengatasi hambatan tersebut dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan demikian, implementasi etika tidak hanya akan memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Y., Kurniasih, D., & Tobirin, T. (2023). Fenomena Kebijakan Dalam Perspektif Etika Administrasi Publik Pada Instansi Di Indonesia. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 14(7), 856–865.
- Choirulsyah, D., & Azhar, A. (2024). Implementasi Etika Administrasi Publik: Langkah Utama dalam Menciptakan Good Governance di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(3), 195–203.



- Effendi, E., Hasanah, A. P., Yolanda, S. D., Rozzy, F., Hayyu, A. D., & Silalahi, N. M. (2024). Analisis peran etika dalam meningkatkan public relations pada citra perusahaan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 3419–3428.
- Febrianti, M. M., & Priyadi, M. P. (2022). Implementasi good governance dan kinerja pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(8).
- Gusrita, S., & Martha, A. (2023). Etika dalam Kepemimpinan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 30070–30076.
- Isroilov, S. S. (2022). Determine Effectiveness of cotton Seed Cleaning and Sorting Machines. *Academia Open*, 7, 10–21070.
- Paraswansa, A. D., & Utomo, D. C. (2024). Whistleblowing dan Korupsi Pada Sektor Publik: A Systematic Review. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 7(1), 94–113.
- Rifdan, R., Haerul, H., & Zainal, H. (2024). *Kepemimpinan Organisasi Publik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Setiawan, A., & Fauzi, E. A. (2019). Etika kepemimpinan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 1(1), 1–12.
- Usman, A., Mediaty, M., Khafifah, A., Ramadhan, M. A., & Randayo, W. A. G. P. (2022). Peranan Akuntansi Manajemen Dalam Pengambilan Keputusan Sebagai Bentuk Good Governance. *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, 2(2), 11–24.